BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kelangsungan hidup perusahaan sangat ditentukan bagaimana perusahaan dapat dikelola dengan efisien, sehingga dapat dimungkinkan tercapainya tujuan. Pencapaian tujuan perusahaan akan sangat ditentukan dalam perbuatan perencanaan perusahaan. Perencanaan tersebut harus realistis, setelah mengkaji lebih dulu bisnis yang dikelola, sumber daya yang dimiliki dan peluang yang akan dihadapi. Perencanaan yang efektif harus didukung oleh fungsi pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan yang efektif, sehingga semua fungsi manajemen dilakukan seoptimal mungkin.

Perencanaan dibuat untuk digunakan sebagai penentu arah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian jelaslah bahwa perencanaan mempunyai fungsi untuk mengarahkan perhatian kepada tujuan tersebut. Perencanaan yang baik, akan memberi arah dari masing – masing bagian dalam perusahaan menuju kepada satu sasaran atau tujuan yang ditetapkan.

Kepala Daerah selaku Pemerintah Daerah pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh dana perimbangan tetapi hal tersebut

harus diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau sistem pengendalian dalam pemerintahan daerah mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang adil, rasional, transparan, dan bertanggungjawab.

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan suatu sistem pemerintahan yang baik *(Good Government).* Tuntutan akan sistem pemerintahan yang baik tersebut diterjemahkan sebagai kondisi pemerintahan yang bebas dari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, yudikatif telah dilaksanakan dengan baik. Selain itu, partisipasi masyarakat akan mendorong praktik demokrasi otonomi daerah.

Dalam rangka memperkuat pelaksanaan akuntabilitas, setiap pejabat yang menyajikan laporan keuangan diharuskan memberikan pernyataan tanggungjawab atas laporan keuangan. Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus secara jelas menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan informasi yang termuat pada laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk mewujudkan transparansi telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang pada intinya pemerintah daerah wajib menyajikan informasi keuangan daerah secara terbuka kepada masyarakat, konsekuensinya setiap pemerintah daerah harus membangun sistem informasi keuangan daerah yang baik.

Penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah kabupaten masih sangat terbatas sehingga secara teoritis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, maka analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan. Kajian empiris mengenai kinerja keuangan daerah di Indonesia selama ini telah banyak dilakukan, diantaranya dimaksudkan untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah kabupaten. Hal ini menunjukkan kecendrungan perhatian yang tinggi terhadap peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Seperti yang dilakukan oleh Puput Risky Pramita (2015) dalam penelitian yang berjudulAnalisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan DaerahKabupaten Kebumen Tahun 2009-2013, dimana peneliti dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Asahan menggunakan lima rasio kinerja keuangan pemerintah daerah, yaitu Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Keserasian Belanja dan Rasio Pertumbuhan.

Begitu juga dalam mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Simalungun, ada lima rasio yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, antara lain :

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat

b. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah, yaitu rasio yang menyatakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah daerah yang diukur dengan membandingkan realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan.

c. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, yaitu rasio yang menyatakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah daerah yang diukur dengan membandingkan realisasi belanja dengan anggaran belanja yang ditetapkan.

d. Rasio Keserasian Belanja, yaitu rasio yang yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja aparatur dan belanja pelayanan publik secara optimal.

e. Rasio Pertumbuhan, yaitu rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode satu ke periode berikutnya, baik dilihat dari sumber pendapatan maupun pengeluaran (belanja).

Sebagai suatu instansi pemerintah, Kabupaten Simalungun juga tentu memiliki fenomena ataupun masalah terkait dengan kondisi keuangan yang dikelola, dimana total anggaranPendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2014

dan 2015 lebih besar dari total realisasi nya. Hal tersebut tertera pada tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2014 – 2015

Tahun Anggaran	Total Anggaran	Total Realisasi	Persentase
2014	Rp.156.842.990.032,00	Rp. 96.390.208.715,29	61,45 %
2015	Rp. 166.632.299.054,77	Rp. 111.893.282.770,10	67,14 %

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Simalungun

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi PAD pada tahun 2014 dan 2015 mengalami penurunan dari PAD yang ditargetkan yaitu sebesarRp60.452.781.316,71 atau sekitar 61,45 % dan Rp 54.539.017.224,77 atau sekitar 67,14 %. Tabel 1.2 berikut ini menyajikan rincian dari pos-pos PAD yang terdapat pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Simalungun

Tabel 1.2

Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2014 - 2015

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Anggaran	Total Realisasi
2014	Hasil Pajak Daerah	Rp 76.582.094.896,00	Rp 44.075.875.456,60
	Hasil Retribusi Daerah	Rp 18.705.387.259,00	Rp 29.406.039.065,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp 53.105.507.877,00	Rp 9.590.065.221,00
	Lain-lain PAD yang Sah	Rp 8.450.000.000,00	Rp 13.318.228.972,69
2015	Hasil Pajak Daerah	Rp 85.304.170.129,74	Rp 54.262.759.144,00
	Hasil Retribusi Daerah	Rp 10.085.201.399,00	Rp 9.872.759.597,92
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp 22.547.662.554,00	Rp 14.986.292.104,00
	Lain-lain PAD yang Sah	Rp. 48.695.264.972,03	Rp 32.771.471.924,18

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset KabupatenSimalungun.

Berdasarkan tabel diatas, anggaran untuk hasil pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2014 dan 2015 sangat jauh dari total realisasinya. Tidak tercapainya anggaran yang telah ditetapkan dikarenakan kesadaran penduduk Kabupaten Simalungun akan pajak daerah masih sangat kurang dan juga kurang maksimal nya pemerintah Kabupaten Simalungun dalam mengelola kekayaan daerah yang dimiliki. Hal inilah yang menyebabkan PAD kabupaten simalungun mengalami penurunan yang cukup tinggi pada tahun 2014 dan 2015. Sementara seperti yang diketahui bahwa hasil pajak daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan sumber pendapatan yang diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam mengelola kabupaten simalungun dari berbagai sektor. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya pembangunan Infrastruktur, SDM, dan Pendidikan yang tidak merata di Kabupaten Simalungun seperti yang terjadi pada saat ini.

Namun berbeda dengan belanja. Pada tahun 2014 dan 2015 total anggaran belanja langsung Pemerintah Kabupaten Simalungun lebih rendah dari total realisasi nya. Tabel 1.3 berikut menyajikan anggaran dan realisasi belanja langsung Pada tahun 2014 dan 2015.

Tabel 1.3

Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung

Tahun	Total Anggaran	Total Realisasi	Persentase
2014	Rp 669.116.318.591,79	Rp 566.896.201.018,29	84,72 %
2015	Rp 735.979.601.761,21	Rp 530.421.581.060,31	72,70 %

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset KabupatenSimalungun.

Pemerintah menetapkan anggaran belanja langsung sebesar Rp 669.116.318.591,76 dan yang terealisasi sebesar Rp 566.896.201.018,29 atau sekitar 84,72 % dan pada tahun 2015 anggaran belanja langsung sebesar Rp 735.979.601.761,21 dan yang terealisasi sebesar Rp 530.421.581.060,31 atau sekitar 72,07 %. Dalam hal mengelola belanja, pemerintah Kabupaten Simalungun masih tergolong serasi, karena anggaran yang ditetapkan untuk belanja tidak semuanya digunakan. Artinya, pemerintah Kabupaten Simalungun kerap melakukan penghematan dalam mengelola belanja langsung nya.

Tabel 1.4 berikut ini menyajikan informasi mengenai rincian belanja langsung Pemerintah Kabupaten Simalungun tahun 2014 dan 2015.

Tabel 1.4

Rincian Belanja Langsung Tahun 2014 - 2015

Tahun	Belanja Langsung	Anggaran	Realisasi
2014	Belanja Pegawai	Rp 61.837.202.922,00	Rp 62.141.207.262,00
	Belanja Barang dan Jasa	Rp 325.768.710.969,00	Rp 278.384.219.076,00
	Belanja Modal	Rp 281.510.404.700,76	Rp 226.370.774.680,29
2015	Belanja Pegawai	Rp 115.539.016.224,00	Rp 91.323.122.832,00
	Belanja Barang dan Jasa	Rp 363.170.889.139,60	Rp 253.421.553.150,16
	Belanja Modal	Rp 257.269.696.397,61	Rp 185.676.905.078,15

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset KabupatenSimalungun.

Berdasarkan tabel diatas belanja langsung pemerintah kabupaten simalungun tahun 2014 – 2015 tergolong baik, karena total anggaran yang ditetapkan untuk setiap pos belanja langsung lebih besar dari total realisasi. Hal ini menunjukkan bahwa kabupaten simalungun cukup efisien dalam mengelola belanja nya.

Banyaknya komentar masyarakat tentang keberhasilan dan ketidakberhasilan instansi pemerintah dalam menjalankan amanah yang diberikan kepadanya menunjukkan harapan dan kepedulian publik yang harus direspon. Namun, antara harapan masyarakat terhadap kinerja instansi pemerintah dengan apa yang dilakukan oleh para pengelola dan pejabat pemerintah sering berbeda.

Pengukuran Kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dikelola dan dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan memilih judul **“ Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Simalungun Untuk Tahun Anggaran 2014 dan 2015 “**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Simalungun jika dilihat dari Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian Belanja dan Rasio Pertumbuhan untuk tahun anggaran 2014 dan 2015

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Keuangan Kabupaten Simalungun jika dilihat dari Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas Keuangan Daerah, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian Belanja dan Rasio Pertumbuhan untuk tahun anggaran 2014 dan 2015.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini,penulis berharap agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pemahaman yang lebih mendalam mengenai evaluasi kinerja keuangan sebagai bagian dari perencanaan jangka panjang pada Pemerintah Kabupaten Simalungun.
2. Bagi instansi pemerintah, penelitian ini diharapakn dapat menjadi masukan dalam kinerja keuangan.,
3. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai informasi yang dapat digunakan untuk bahan penelitian dan menambah pengetahuan bagi yang berminat dalam bidang yang serupa.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Laporan Keuangan Daerah

Pengertian akuntansi pemerintahan tidak terlepas dari pengertian akuntansi secara umum. Karena akuntansi pemerintahan/keuangan daerah merupakan salah satu jenis akuntansi, maka dalam akuntansi keuangan daerah juga terdapat proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi – transaksi ekonomi yang terjadi.

Menurut Rachmat, bahwa :

> **Akuntansi pemerintahan adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga – lembaga yang tidak bertujuan mencari laba.**[1]

Dalam bukunya Abdul Halim menjelaskan bahwa :

> **Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari entitas Pemerintah Daerah (Kabupaten, Kota, Provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak pihak eksternal entitas Pemda (Kabupaten, Kota, atau Provinsi).**[2]

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi – transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan

---

[1]Rachmat, **Akuntansi Pemerintahan**, Edisi 1 : CV. Pustaka Setia, Bandung, 2010, hal.45

[2]Abdul Halim, **Akuntansi Keuangan Daerah**, Edisi Ketiga : Salemba Empat, Jakarta, 2007, hal. 42

laporan keuangan daerah merupakan informasi yang menurut data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial merupakan pencerminan hasil aktivitas ekonomi suatu organisasi pemerintah daerah pada saat atau pada periode tertentu.

Menurut Hery, bahwa :

> **Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.**[3]

Oleh karena itu, akuntansi keuangan daerah merupakan suatu proses pengidentifikasian, pngukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) yang digunakan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonom yamg diperlukan oleh pihak – pihak Pemda. Pihak eksternal pemda yang memerlukan akuntansi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah antara lain adalah DPRD, Badan Pemeriksa Keuangan, Investor, Kreditur dan Donatur, Analis Ekonomi dan Pemerhati Pemda, Rakyat, Pemda Lain, dan Pemerintah Pusat , yang seluruhnya termasuk dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terutama digunakan untuk membandingkan

---

[3]Hery, **Teori Akuntansi**, Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta, 2013, hal. 7.

realisasi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang undangan.

Abdul Halim mengemukakan pengertian laporan keuangan daerah sebagai berikut :

Laporan Keuangan Daerah merupakan informasi yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial yang merupakan pencerminan hasil aktivitas ekonomi suatu organisasi pemda pada suatu saat dan atau periode waktu.[4]

Maka dapat disimpulkan bahwa Laporan Keuangan Daerah merupakan bagian dari pelaporan keuangan dalam Pemerintah Daerah. Laporan keuangan tersebut merupakan representasi posisi transaksi – transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pemerintah. Oleh karena itu, semua transaksi di dalam akuntansi harus dinyatakan satuan uang (rupiah). Laporan keuangan daerah adalah informasi yang disusun oleh suatu pemerintah daerah yang terutama ditujukan bagi kepentingan pihak luar pemerintah daerah tersebut.

2.2. Komponen dan Unsur Laporan Keuangan

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010, menyatakan bahwa :

Laporan Keuangan terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

c. Neraca

[4]Abdul Halim,Op.,Cit, hal. 245

d. Laporan Operasional (LO)

e. Laporan Arus Kas (LAK)

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) "[5]

A. Neraca

Menurut Nunuy Nur Afiah bahwa **" neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan entitas ekonomi pada suatu saat (tanggal) tertentu."**[6]

Dalam Neraca elemen – elemen yang menyusun entitas tersebut akan tergambar dengan jelas, sehingga neraca sering disebut sebagai potret posisi keungan suatu entitas. Laporan Neraca Daerah akan memberikan informasi penting kepada Manajemen, Pemerintah Daerah. Dengan demikian, neraca daerah akan berisi laporan tentang posisi keuangan, utang, dan ekuitas dana daerah pada saat tertentu, yang biasanya pada awal dan akhir periode.

Masing – masing unsur neraca tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan mata uang termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk

---

[5]Komite Standar Akuntansi Pemerintah**, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi PemerintahBerbasis Akrual**: Salemba Empat, Jakarta, 2010, paragraf 15, KK-8.

[6]Nunuy Nur Afiah**, Akuntansi Pemerintahan : Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah daerah,**Kencana,Jakarta,2010,hal.13

penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber – sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.[7]

Aset dapat diklasifikasikan dalam aset lancar, dan non-lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan dapat segera direalisasi atau dimiliki untuk dipakai atau dijual untuk kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas , investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Aset Non-lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tidak berwujud yang digunkaan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan oleh masyarakat umum. Aset Non-lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, cadangan, dan aset lainnya.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan atau kepenugasannya berpindah.

Pengukuran aset adalah sebagai berikut :

1. Kas dicatat sebesar nilai nominal.

2. Investasi jangka pendekdicatat sebesar nilai perolehan.

3. Piutang dicatat sebesar nilai nominal.

4.Persediaan dicatat sebesar :

a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.

b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri

---

[7]Nurlan Darise, **Akuntansi Keuangan Daerah**, Cetakan Pertama : Indeks, Jakarta, 2008, hal. 59.

c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.[8]

2. Kewajiban

Kewajiban adalah Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.[9]

Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.Pengakuan kewajiban pada saat dan pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari :

a. **Transaksi dengan pertukaran.**
b. **Transaksi tanpa pertukaran sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan.**
c. **Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah.**
d. **Kejadian yang diakui pemerintah.**[10]

Pengukuran kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar Surat Utang Pemerintah

---

[8]**Ibid**., hal 61.
[9]**Ibid**.,hal.86.
[10]**Ibid**,. hal.87.

3. Ekuitas Dana

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Ekuitas dana menurut Nunuy Nur Afiah diklasifikasikan atas tiga bagian yaitu :

a. Ekuitas dana lancar b. Ekuitas dana investasi c. Ekuitas dana cadangan"[11]

a. Ekuitas dana lancar, yaitu selisih anatara aset lancar dan cadangan atas kewajiban jangka pendek, seperti cadangan piutang, cadangan persediaan, dan lain – lain.

b. Ekuitas dana inestasi, mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam inestasi jangka panjang , aset tetap dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.

c. Ekuitas dana cadangan, mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang undangan.

B. Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan**: " Laporan Realisasi Anggaran Menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang**

[11]**Op.,Cit.,**hal.17.

menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.[12]

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi dalam suatu periode akuntansi

Unsur – unsur yang diakup secara langsung dalam Laporan Realisasi Anggaran meliputi unsur – unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan masing – masing unsur – unsur tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan

Menurut Nurlan Darise :

> **Pendapatan adalah semua pemerimaan rekening Kas Umum Negara / Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.**[13]

Pendapatan menurut basis kas diakui pada saat diterima di rekening kas umum daerah. Pendapatan menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut.

---

[12]Komite Standar Akuntansi Pemerintah**, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah**: Salemba Empat, Jakarta, 2010, hal. 15, paragraf 33, Lampiran I.01.

[13]Nurlan Darise. **Op,Cit,.** Hal 97.

2. Belanja

Menurut Mahmudi :

Belanja dapat dipahami sebagai kewajiban pemerintah daerah yang mengurangi kekayaan bersih yang terjadi akibat transaksi masa lalu.[14]

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum Negara/ Daerah.

3. Pembiayaan

Nunuy Nur Afiah mengemukakan bahwa :

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit ataupun memanfaatkan surplus anggaran.[15]

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas daerah dan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan pembukuan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran), dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas daerah.

---

[14]Mahmudi, **Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,** Cetakan Pertama: UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2016, hal. 153.

[15]Nunuy Nur Afiah,**Akuntansi Pemerintahan:Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah**,Kencana,Jakarta,2010,hal.xxvii

C. Catatan Atas Laporan Keuangan

Seperti yang dikutip pada Wikipedia.org bahwa : **"Catatan atas Laporan Keuangan adalah catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan ke akhir laporan keuangan untuk memberikan tambahan informasi kepada pembaca dengan informasi lebih lanjut. Catatan atas Laporan Keuangan membantu menjelaskan perhitungan item tertentu dalam laporan keuangan serta memberikan penilaian yang lebih komprehensif dari kondisi keuangan perusahaan.".**[16]

Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka – angka yang tertera dalam Laporan realisasi Anggaran, dan Neraca. Catatan Atas Laporan keuangan yang mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan di dlaam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah serta ungkapan - ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Catatan Atas Laporan Keuangan harus menyajikan yang diharuskan dan dianjurkan oleh pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas kaporan keuangan, seperti kewajiban kontijensi dan komitmen – komitmen lain. Pengungkapan informasi dalam Catatan Atas Laporan Keuangan harus dapat memberikan informasi lain yang belum disajikan dalam bagian lain laporan keuangan.

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos – pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain :

---

[16]**https://id.wikipedia.org/wiki/Catatan_atas_laporan_keuangan**

a.Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro

c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala danhambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.

d. Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakankebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.

f. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar , yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.[17]

Setiap entitas pelaporan perlu mempertimbangkan sifat kegiatan – kegiatan dan kebijakan – kebijakan yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Catatan Atas Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan kejadian – kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti :

a. Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan

b. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru

c. Komitmen atau kontijensi yang tidak dapat disajikan pada neraca

[17]Komite Standar Akuntansi Pemerintah**, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi PemerintahBerbasis Akrual**: Salemba Empat, Jakarta, 2010, hal.4, paragraf 24, Lampiran I.05.

d. Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan, dan

e. Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggulangi oleh pemerintah.[18]

2.3. Peranan dan Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.3.1 Peranan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandungkan realisasi pendapatan, belanja transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas, dan efisiensi entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, peranan laporan keuangan adalah :

a. **Akuntabilitas**
   Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik
b. **Manajemen**
   Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

---

[18]**Op.,Cit.,Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.** hal. 13, paragraf 20, Lampiran I.05.

c. **Transparansi**
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. **Keseimbangan antargenerasi *(intergenerational equity)***
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluran tersebut.

e. **Evaluasi Kinerja**

Mengevalusi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan[19]

2.3.2. Tujuan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, maupun politik dengan cara :

a. **Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.**
b. **Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran**
c. **Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai**

[19]Op.,Cit.,**Komite Standar Akuntansi Pemerintahan** hal. 7, paragraf 4, Lampiran 1.01.

d. **Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya**
e. **Menyediaakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.**
f. **Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan**[20]

Jadi, laporan keuangan pemerintah daerah didasari kebutuhan untuk mengontrol sumber daya dan biaya, menyediakan akuntabilitas sebagai upaya menunjukkan kebutuhan hukum dan peraturan. Kemudian pemerintah daerah diharapkan mampu menyajikan informasi pengelolaan keuangan untuk memberikan penjelasan yang menyeluruh kepada seluruh kelompok pengguna laporan keuangan. Hal ini dilakukan sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan menciptakan good governance. Untuk memenuhi tujuan – tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dan cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas suatu entitas pelaporan.

2.4. Analisis Kinerja Keuangan

Sebagai perwujudan atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dan Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Cara Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

[20]Op.,Cit,**Komite Standar Akuntansi Pemerintahan**. hal. 7, paragraf 29, Lampiran I.01.

Mengingat sistem yang diterapkan selama ini belum dpaat menjembatani penyusunan laporan keuangan, maka dilakukan pendekatan praktis yaitu mengumpulkan, mwnganalisa, mencatat anggaran dan realisasi serta data lainnya ke dalam pos – pos neraca dan laporan realisasi anggaran. Dalam penyususnan laporan keuangan ini bekum seluruhnya berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010.

Kinerja Keuangan pemerintah dunilai apabila alokasi dari realisasi anggaran terlaksana dengan baik. Realisasi anggaran terdiri dari pendapatan dan belanja. Pendapatan adalah semua penerimaan kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalm periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintahan dan tidak perlu bayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada kas umum daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azaz bruto, yaitu dengan menbukukan penerimaan bruto, dan tidak dicatat jumlah nettonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Misalnya, estimasi pendapatan yabg dianggarkan dari Dinas Pendidikana dalah nol. Dinas pendidikan merupakan pusat biaya yang bertanggungjawab atas bidang pendidikan yang bukan merupakan sumber pendapatan.

Belanja adalah semua pengeluaran kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluran kas dari kas umum daerah kecuali uang persediaan. Khusus pengeluaran dari uang persediaan melalui bendahara pengeluaran, pengakuaan

belanja terjadi pada saat dipertanggungjawabkan atas pengeluaran tersebut dan disahkan oleh pengguna anggaran. Belanja dilakukan dengan memeprtimbangkan prinsip – prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan – kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana kerja anggaran. Belanja Dinas Pendidikan meliputi belanja operasi yang terdiri dari belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, serta belanja aset tetap lainnya.

Penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas sehingga secaar teoritis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, maka analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan.

Adapun pihak – pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pemerintah daerah adalah:

1. Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya
2. Pemerintah pusat/provinsi sebagai masukan dalam membina pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

3. Masyarakat dan kreditur, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman untuk membeli obligasi.

Dengan demikian dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja yang dapat digunakan menurut Halim dalam Hony Adhoiantoko yaitu "**Rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio keserasian belanja dan rasio pertumbuhan ".**[21]Untuk itu, penjelasan terkait denga rasio kemadirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi dan rasio keserasian belanja sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

> **Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang dikeluarkan daerah**.[22]

Rasio Kemandiriandihitung dengan cara membandungkan jumlah penerimaan dan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mebiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Rasio kemandirian dihitung dengan membagi total PAD dengan total belanja daerah dalam satuan persen. Semakin tinggi

---

[21]Hony Adhiantoko.**Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (studi kasus pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerahkabupaten blora tahun 2007 - 2011).**Hal 18.Skripsi.Universitas Negeri Yogyakarta. 2013.

[22]Afriyanto, Weni Astuti, **Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu**.Skripsi.Universitas Pasir Pengaraian

rasio ini berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak pemerintah pusat dan provinsi semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masayarakat dalam membayar pajak dan rtribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD. Secara sederhana rasio kemandirian dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Pola hubungan pemerintah pusat dan daerah serta tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan daerah dapat disajikan dalam matriks seperti tampak pada Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1

Pola Hubungan Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	> 25 – 50	Konsultatif
Sedang	>50 – 75	Partisipatif
Tinggi	> 75- 100	Delegatif

Sumber : Abdul Halim dalam Hony Adhiantoko. 2013. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (studi kasus pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerahkabupaten blora tahun 2007 - 2011).Skripsi.Universitas Negeri Yogyakarta.

Rasio Kemandirian keuangan daerah atau yang sering disebut sebagai otonomi fiskal menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio ini juga menggambarkan

ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin rendah, begitu pula sebaliknya.

2. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah[23].

Pengertian efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh bedar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Rasio efektivitas merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah daerah yang diukur dengan membandingkan realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan dalam satuan persen. Rasio efektivitas diukur dengan :

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran pendapatan}} \text{ x } 100\ \%$$

Nilai efektivitas diperoleh dari perbandingan sebagaimana tersebutdiatas, diukur dengan kriteria penilaian kinerja keuangan :

[23]**Op.,Cit.,**Afriyanto,Weny Astuti.hal, 20

Tabel 2.2

Efektivitas Keuangan Daerah

Efektivitas Keuangan Daerah Otonom dan Kemampuan Keuangan	Rasio Efektivitas (%)
Sangat Efektif	>100
Efektif	100
Cukup Efektif	90 – 99
Kurang efektif	75 – 89
Tidak Efektif	< 7

Sumber : Mahmudi, **Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,**UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2016.

3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah daerah yang diukur dengan membandingkan realisasi belanja dengan anggaran belanja yang telah ditetapkan dalam satuan persen[24].

Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien. Begiru pula sebaliknya. Pada sektor pelayanan masyarakat adalag suatu kegiatan yang dilakukan dengan baik dan pengorbanan seminimal mungkin. Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (output) dengan biaya (input) yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan. Rasio efisiensi diukur dengan :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\ \%$$

Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi belanja dan anggaran belanja daerah dengan menggunakan ukuran efisiensi tersebut, maka penilaian kinerja keuangan dapat ditentukan.

[24]**Op,.Cit,..**Afriyanto,Weny Astuti.hal. 25

Tabel 2.3

Efisiensi Keuangan Daerah

Efisiensi Keuangan Daerah Otonom dan Kemampuan Keuangan	Rasio Efisiensi (%)
Sangat Efisien	<10
Efisien	10 – 20
Cukup Efisien	21 – 30
Kurang Efisien	31 – 40
Tidak Efisien	>40

Sumber : Mahmudi, **Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,**UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2016.

Faktor penentu efisiensi dan efektivitas sebagai berikut :

a. Faktor sunber daya, baik sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan.

b. Faktor struktur organisasi, yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan, baik itu struktural maupun fungsional.

c. Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan

d. Faktor Dukungan kepada aparatur dan pelaksanaannya, baik pimpinan maupun masyarakat

e. Faktor pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor tersebut kedalam suatu usaha yang berdaya guyna dan berhasil guna untuk mencapai sasaran yang dimaksud

4. Rasio Keserasian Belanja

Rasio Keserasian Belanja menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja aparatur dan belanja pelayanan publik secara optimal[25].

Dalam penelitian ini digunakan proporsi belanja publik karena belanja publik secara langsung *dimaksudkan* untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Rasio keserasian diukur dengan membandingkan realisasi total belanja publik dengan total belanja daerah dalam satuan persen. Secara sederhana rasio keserasian belanja dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{RasioKeserasianBelanja} = \frac{\text{Belanja Pelayanan Publik}}{\text{Total belanja Daerah}} \text{ X } 100\ \%$$

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya Rasio Belanja Operasi maupun Modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah di negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja pembangunan yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah.

5. Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan yaitu rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode satu ke

[25]**Op,.Cit,.**Afriyanto,Weny Astuti.hal. 28

periode berikutnya, baik dilihat dari sumber pendapatan maupun pengeluaran[26]. Untuk menghitung rasio pertumbuhan keuangan pemerintah daerah dapat digunakan rumus berikut :

$$r = \frac{Pn - Po}{Po}$$

keterangan : r = Rasio Pertumbuhan

Pn = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-n

Po = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n)

2.5 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Puput Risky Pramita (2015) dengan judul "Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan DaerahKabupaten Kebumen Tahun 2009-2013" menjelaskan bahwa Hasil analisis menunjukkan Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen dilihat dari (1) Rasio Efektivitas PAD dapat dikategorikan Efektif, karena rata-rata efektivitasnya sebesar 104,46% (2) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah tergolong Efisien karena rata-rata besarnya rasio ini sebesar 99,82% (3) Rasio Keserasian dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen mengalokasikan sebagian besar anggaran belanjanya untuk belanja operasi daerah yaitu rata-rata sebesar 80,97% dibandingkan dengan rata-rata belanja modal sebesar 16,68%, (4) Rasio Pertumbuhan pendapatan, PAD, Belanja Operasi selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dan Pertumbuhan Belanja Modal fluktuatif (5) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih

[26]**Op,.Cit,.**Hony Adhiantoko, hal 23

tergolong Rendah Sekali dan dalam kategori pola hubungan Instruktif karena rata-rata rasionya sebesar 7,80%.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hony Adhiantoko (2013) dengan judul " Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007 - 2011) " menunjukkan bahwa Hasil analisis menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Blora dilihat dari (1) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan sangat kurang, karena rata-ratanya sebesar 6,57% (2) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pola hubungannya masih tergolong dalam pola hubungan instruktif karena rata-rata besarnya rasio ini sebesar 7,17% (3) Rasio Efektivitas PAD efektivitas kinerja keuangan Kabupaten Blora sudah efektif karena rata-rata efektivitasnya di atas 100% yaitu 108,71%. (4) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dikatakan kurang efisien karena rata-rata efisiensi keuangan daerah Kabupaten Blora sebesar 99,61% (5) Rasio Keserasian diketahui bahwa rata-rata belanja operasi daerah masih sangat tinggi yaitu 84,55% dibandingkan dengan rata-rata belanja modal sebesar 12,99% sehingga dapat dikatakan Pemerintah Daerah masih kurang memperhatikan pembangunan daerah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Andita Wardhani (2012) dengan judul "Analisis Kinerja KeuanganAnggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012" menunjukkan bahwa Setelah melakukan analisis, hasil penelitian

menunjukkan bahwa (1) Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten secara umum dikatakan baik. Hal ini dibuktikan (a) Varians Pendapatan Daerah rata-rata di atas 100%, (b) Pertumbuhan Pendapatan Daerah rata-rata (positif) 12,13%, (c) Rasio Keuangan Pendapatan Daerah dilihat dari Derajat Desentralisasi menunjukkan rata-rata 5,03% (rendah), Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah relatif tinggi rata-rata 90,44%, Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah, secara umum rasio efektifitas rata-rata 103,82% dan rasio efisiensi rata-rata 12,33%, Derajat Kontribusi BUMD mencapai angka rata-rata 0,23%. (2) Kinerja Keuangan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten secara umum dapat dikatakan baik. Hal ini dibuktikan (a) Varians Belanja Daerah rata-rata di bawah 100%, (b) Pertumbuhan Belanja Daerah mengalami pertumbuhan rata-rata 11,00%, (c) Keserasian Belanja Daerah dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Klaten mengalokasikan sebagian besar anggaran belanjanya untuk Belanja Operasi rata-rata 90,33% dibandingkan dengan Belanja Modal rata-rata 9,57%, (d) Efisiensi Belanja Daerah menunjukkan rata-rata di bawah 100%.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Desain penelitian dapat mengacu pada penelitian kuantitatif atau kualitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan variabel – variabel dan data kuantitatif, sedangkan penelitian kualitatif akan menggunakan variabel – variabel dan data kualitatif.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang dapat diartikan sebagai pemecahan masalah yang digunakan dalam bentik kata, kalimat, dan gambar. Dengan demikian penelitian ini akan mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Simalungun pada tahun 2014 dan 2015

3.2. Objek Penelitian

Objek Penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Simalungun. Pemerintah Kabupaten Simalungun merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara dimana kabupaten ini dipimpin oleh bapak Bupati Dr. J.R Saragih, SH.,MM dan lokasi perkantoran terletak di Kompleks SKPD Kabupaten Simalungun di Pamatang Raya.

3.3. Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan satu jenis data, yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Data sekunder yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2014 dan 2015

3.4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan metode :

1. Penelitian Kepustakaan

   Metode ini dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah pustaka yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi. Penelitian ini dilakukan berdasarkan kepustakaan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dianalisis serta bahan-bahan lain seperti materi perkuliahan

2. Dokumentasi

   yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen internal perusahaan yang terkait dengan lingkup penelitian ini, data tersebut terdiri dari gambaran umum Pemerintah Kabupaten Simalungun dan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2014 dan 2015.

3.5. Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode deskriptif dan analisis rasio.

Metode deskriptif adalah suatu metode analisis laporan keuangan dengan cara menghitung perbandingan antara unsur-unsur yang terdapat dalam laporan keuangan dan diinterpretasikan, sehingga dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai posisi keuangan dan kinerja perusahaan.

Metode Analisis Rasio adalah Suatu metode perhitungan dan interpretasi rasio keuangan untuk menilai kinerja. Dalam penelitian ini, rasio yang digunakan adalah rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio keserasian belanja dengan rumus sebagai berikut :

a. Rasio Kemandirian

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

b. Rasio Efektivitas

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

c. Rasio Efisiensi

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\%$$

d. Rasio Keserasian Belanja

$$\text{Rasio Keserasian Belanja} = \frac{\text{Belanja Pelayanan Publik}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

e. Rasio Pertumbuhan

$$\text{Rasio Pertumbuhan} \quad r = \frac{Pn - Po}{Po}$$

DAFTAR PUSTAKA

Rachmat, **Akuntansi Pemerintahan,** Edisi Pertama: CV.Pustaka Setia, Bandung, 2010.

Bastian, Indra, **Sistem Akuntansi Sektor Publik**, Edisi Kedua, Cetakan Kedua: Salemba Empat, Jakarta, 2007.

Darise, Nurlan, **Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),** Cetakan Kedua : Indeks, Jakarta, 2008.

Halim, Abdul, **Akuntansi Keuangan Daerah**, Edisi Ketiga: Salemba Empat, Jakarta, 2007.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan**, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah**: Salemba Empat, Jakarta, 2010.

Mahmudi, **Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,**UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2016.

Hony Adhiantoko. 2013. **Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (studi kasus pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerahkabupaten blora tahun 2007 - 2011).***Skripsi*.Universitas Negeri Yogyakarta

Afiah, Nunuy Nur,**Akuntansi Pemerintahan:Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah**,Kencana,Jakarta,2010

Hery, **Teori Akuntansi**, Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta, 2013

Suryabrata, Sumadi, **Metodologi Penelitian**, Edisi Pertama, Cetakan Keduapuluh: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

Id.wikipedia.org